

Peran Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah

The Role of Balance Funds in Improving Regional Financial Performance
in Central Lombok Regency

✉ **Fathurrahman**

Universitas Islam Al- Azhar, Indonesia

ARTICLE INFO

Dana Perimbangan,
DAU DAK DBH,
Kinerja Keuangan Daerah,
Kabupaten Lombok Tengah.

Article History:

Received : 8 Januari 2025

Accepted : 14 Mei 2025

Publish : 30 Juni 2025

ABSTRAK:

Studi ini membahas peran dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Selain itu studi ini menekankan bagaimana dana perimbangan dapat meningkatkan sumber pendapatan serta peningkatan pelayanan public di Kabupaten Lombok Tengah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan beberapa data LKPD 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023. Studi ini menemukan bahwa Meskipun dana perimbangan sangat membantu, Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi masalah besar karena ketimpangan fiskal dan sumber pendapatan yang terbatas. Untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat, pemanfaatan potensi pariwisata yang melimpah harus menjadi fokus utama. Ini adalah situasi di mana Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur pariwisata yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi daerah. Selain itu mengelola dana perimbangan secara jelas dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tepat dan bermanfaat langsung bagi masyarakat melalui pengawasan yang baik dan evaluasi berkala. Dengan demikian, dana perimbangan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah.

ABSTRACT:

This study discusses the role of balancing funds in improving regional financial performance. In addition, this study emphasizes how balancing funds can increase revenue sources and improve public services in Central Lombok Regency. This study uses a descriptive qualitative approach using some LKPD data for the last 5 years from 2019-2023. The study found that although dana perimbangan is very helpful, Central Lombok district still faces major problems due to fiscal imbalances and limited revenue sources. To increase PAD and reduce dependence on transfer funds from the center, utilizing the abundant tourism potential should be the main focus. This is a situation where the Special Allocation Fund (DAK) can be used to help develop better tourism infrastructure, which in turn will boost the regional economy. In addition, managing the balancing funds in a clear and accountable manner. To that end, local governments must ensure that funds are used in accordance with the right development priorities and directly benefit the community through good supervision and regular evaluation. Thus, the balancing funds can be used optimally to improve the welfare of the community and encourage the fiscal independence of Central Lombok Regency.

How to Cite:

Fathurrahman. (2024). Peran Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 99-114. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.786>.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Unizar No.20, Turida, Kec. Sandubaya,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83237.

Email : fathurrahmanmaks@gmail.com

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 99-114

PENDAHULUAN

Dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), adalah alat penting untuk desentralisasi fiskal dalam upaya mengurangi disparitas fiskal antara daerah (Kementerian Keuangan, 2023). Transfer dana ini secara umum menyumbang tiga puluh persen dari pendapatan daerah di Indonesia, terutama di daerah dengan sumber daya fiskal yang terbatas (World Bank, 2021). Namun, seberapa efektif itu bergantung pada kebijakan daerah tentang bagaimana dana dialokasikan dan dikelola. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah dengan pengelolaan yang baik mengalami pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih besar, sementara wilayah lain stagnan dan masih bergantung pada pusat (Bappenas, 2020).

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki yang peran penting dalam memajukan perekonomian kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung kinerja keuangan daerah adalah Dana Perimbangan. Dana ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang diperuntukkan bagi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun Dana Perimbangan telah ada sejak lama, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi keuangan daerah. Dana perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan belanja modal mempunyai pengaruh negatif (Putu dkk., 2020). Selain itu Dana perimbangan mempunyai dampak besar dan positif terhadap belanja modal, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Primadi dkk., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Mussa & Wanjiru (2019) menyelidiki peran Dana Perimbangan dalam negara-negara berkembang, dengan penekanan khusus pada negara-negara di Afrika dan Asia. Penelitian ini menemukan bahwa Dana Perimbangan dapat meningkatkan stabilitas fiskal dan pembangunan regional, terutama di negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Namun, mereka juga menemukan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan cara dana dialokasikan sering menghambat kinerjanya. Penelitian ini di Indonesia menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dapat berkontribusi lebih baik pada pembangunan daerah jika ada perbaikan dalam koordinasi pemerintah pusat dan daerah dan transparansi dalam pembagian dana.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bahl & Linn (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Perimbangan sulit dilakukan di negara-negara yang menghadapi keragaman ekonomi daerah. Mereka menekankan bahwa meskipun Dana Perimbangan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesetaraan pembangunan, kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut sangat bergantung pada kemampuan kelembagaan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa beberapa wilayah dengan kapasitas pengelolaan yang rendah cenderung tidak memanfaatkan Dana Perimbangan secara efektif untuk proyek pembangunan yang produktif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan administratif di daerah yang kurang berkembang untuk memastikan bahwa Dana Perimbangan dapat memberikan dampak yang paling besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021).

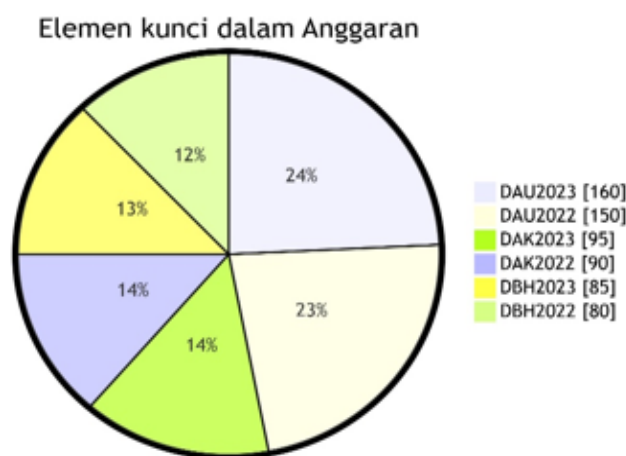
Mahendra (2020) melihat seberapa efektif Dana Perimbangan di beberapa

daerah di Indonesia. Meskipun Dana Perimbangan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, Mahendra menemukan bahwa faktor-faktor seperti kapasitas manajemen dan kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat mempengaruhi seberapa efektif dana tersebut digunakan. Misalnya, dalam kasus Kabupaten Lombok Tengah, meskipun dana yang dialokasikan sangat besar, kurangnya kapasitas pengelolaan yang memadai menyebabkan proyek pembangunan tertunda dan tidak tepat waktu. Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memerlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar Dana Perimbangan dapat digunakan secara optimal bukan hanya untuk mengisi kekurangan anggaran tetapi juga untuk meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (2024) Dana Perimbangan di Indonesia pada tahun 2022-2023 dapat dilihat pada gambar 1.

Analisis Tren Dana Perimbangan DAU (Dana Alokasi Umum) menunjukkan peningkatan pada tahun 2023, menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk memberikan alokasi yang lebih besar pada daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerataan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar. Meskipun

meningkat sedikit pada tahun 2023, DAK (Dana Alokasi Khusus) tetap stabil karena pengalokasiannya lebih tertumpu pada inisiatif prioritas yang telah ditentukan. Kebutuhan pembangunan fisik di daerah tertinggal biasanya menjadi alasan penyesuaian ini. Pada tahun 2023, DBH (Dana Bagi Hasil) mengalami kenaikan kecil. Namun, perubahan hasil pajak dan eksplorasi sumber daya alam, yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga komoditas global, dapat berkontribusi pada perubahan tersebut (Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2023).

Kabupaten Lombok Tengah masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan, sehingga Dana Perimbangan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan. Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kabupaten ini menghadapi masalah dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung proyek pembangunan penting. Sebagai contoh, Lombok Tengah



Sumber: BPS 2024

Gambar 1. Komposisi Dana Perimbangan Tahun 2022-2023

menerima DAU masih dipergunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, membeli fasilitas kesehatan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, dana ini membantu pemerintah daerah mengurangi ketergantungannya pada PAD, yang biasanya rendah.

Namun, meskipun Dana Perimbangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan anggaran daerah, distribusi dan penggunaannya tidak selalu optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan daerah dan alokasi yang diterima sering kali menjadi isu utama, di mana beberapa sektor mengalami kekurangan dana sementara sektor lainnya kelebihan anggaran. Selain itu, kapasitas manajerial dalam pengelolaan dana juga mempengaruhi efektivitas pemanfaatannya. Beberapa proyek pembangunan di Lombok Tengah, meskipun didanai oleh Dana Perimbangan, mengalami kendala dalam hal pengawasan dan akuntabilitas, yang berujung pada kurang optimalnya hasil yang dicapai. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Perimbangan yang lebih baik dan efisien, dengan memperhatikan keadilan distribusi dan peningkatan kapasitas daerah dalam merencanakan serta melaksanakan proyek, sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

Gap riset utama dalam penelitian mengenai *Peran Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah* terletak pada kurangnya analisis mendalam mengenai faktor internal daerah, ketimpangan distribusi dana, hubungan dengan peningkatan PAD, variabel non-ekonomi, perbedaan karakteristik antar daerah, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Dalam studi ini akan menganalisis terkait factor internal daerah serta bagaimana Dana Perimbangan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendorong kinerja keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Teori Desentralisasi Fiskal Oates (1972) adalah dasar penelitian ini. Teori ini menyatakan bahwa transfer dana dari pusat ke daerah harus memenuhi persyaratan kesetaraan fiskal dan efisiensi alokatif. Teori ini digunakan dalam konteks Kabupaten Lombok Tengah untuk mengevaluasi apakah Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) telah memenuhi prinsip “dana mengikuti fungsi” (Shah, 1994), yang berarti bahwa alokasi dana harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976) untuk menghindari ketidakseimbangan informasi dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan dana.

Middle Theory dan Applied Theory: Pada tingkat menengah, penelitian ini merujuk pada Teori Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting) (Melkers & Willoughby, 2005) untuk menilai efektivitas dana perimbangan dalam meningkatkan output pembangunan daerah, seperti rasio belanja modal terhadap PDRB. Di tingkat terapan, Model Evaluasi Efektivitas Dana Transfer (Bird & Smart, 2009) digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan PAD, dengan indikator seperti (1) Elastisitas PAD terhadap peningkatan DAU/DAK; (2) Indeks Kemandirian Fiskal (Kemenkeu, 2023), (3) Kualitas Tata Kelola Anggaran (BPKP, 2022) berdasarkan proxy akuntabilitas.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor internal daerah yang berkontribusi pada optimalisasi pemanfaatan Dana Perimbangan untuk meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini berfokus pada kapasitas kelembagaan, mekanisme alokasi, pengawasan, dan akuntabilitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diukur untuk membantu pemerintah

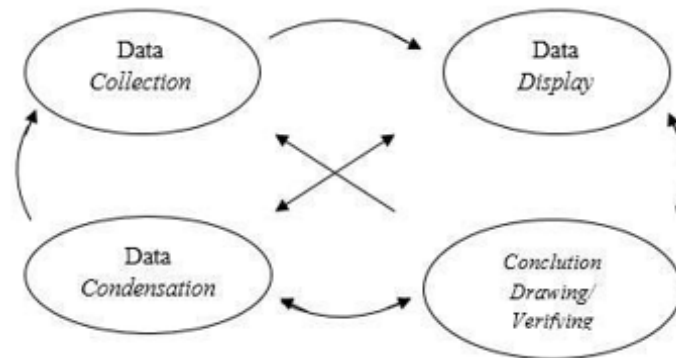
daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola fiskal.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam studi ini dan berfokus pada *Peran Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah* di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian merupakan penelitian deskriptif, bertujuan memberikan gambaran lebih mendetail terkait Kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah terutama dari sisi peran dana perimbangan berdasarkan keadaan sebenarnya yang dihimpun dari data primer dan sekunder di lokus penelitian. Penelitian pada lokus dilakukan dengan wawancara sebagai data primer terhadap informan pada lokus penelitian yang dapat dilihat pada tabel 1.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD dan analisis dokumen LKPD tahun 2019-2023. Untuk unit analisisnya dilakukan dalam lingkup Kabupaten Lombok Tengah dengan menganbil beberapa informan dari OPD teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Studi dilakukan selama 6 bulan.

Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari pendokumentasian dan kepustakaan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian



Sumber: Miles dkk., 2014

Gambar 2
Model Analisa Data Interaktif

Tabel 1. Tujuan, Analisis, Teknik Pengumpulan Data dan Informan

No	Tujuan	Analisis	Teknik Pengumpulan Data	Informan
1	Merumuskan Peran Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah	Literature Review Analisis Deskriptif Kualitatif	Indepth Interview FGD Dokumen (LKPD Kabupaten Lombok Tengah 2019-2023)	Pemerintah Daerah (Baperida, BPKAD, Bappaenda, Inspektorat, Dinas Teknis Terkait) Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

data serta menyimpulkan data dengan menggunakan model Model Analisa Data Interaktif (Saldana & Huberman, 2014) meliputi langkah-langkah:

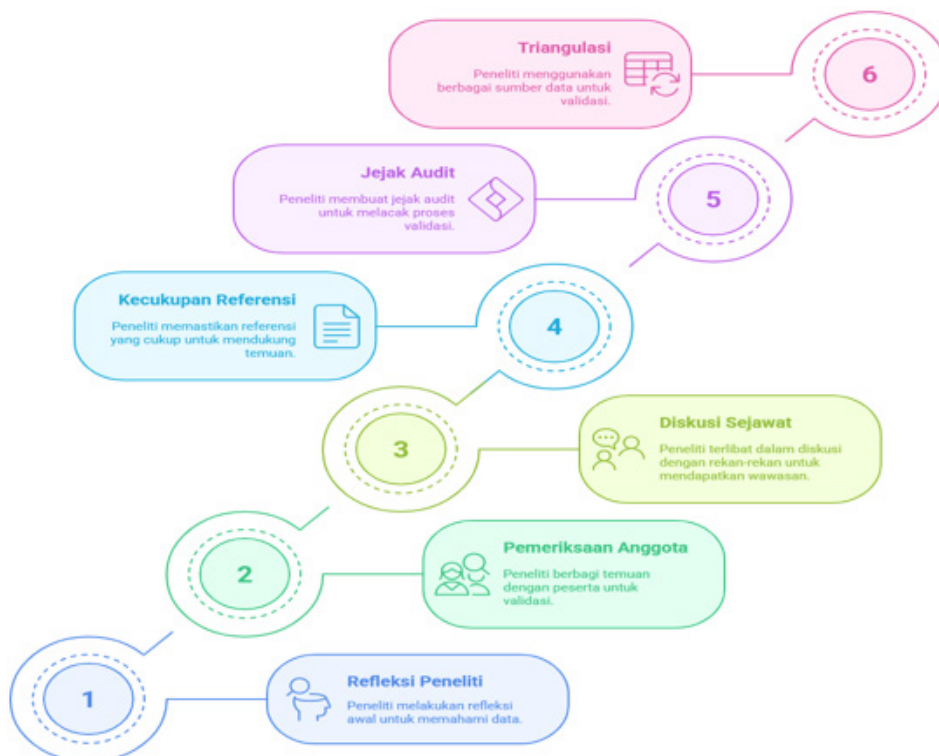
- a. Reduksi Data. Reduksi data. Dari lokasi penelitian, data lapangan disajikan secara lengkap dan rinci dalam laporan laporan. Data dan bukti tersebut kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian disortir menurut poin-poin utama, dengan fokus pada pemilihan poin-poin yang paling penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses editing, coding dan tabulasi).
- b. Penyajian data (visualisasi data) dirancang untuk memudahkan peneliti melihat gambaran besar atau potongan-potongan tertentu dari data penelitian. Pengorganisasian data ini dalam bentuk tertentu (tabel, gambar atau grafik)

menjelaskan bahwa angka ini lebih lengkap.

- c. Kesimpulan, dalam penelitian kualitatif, pengecekan data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Sejak memasuki lapangan dan dalam proses pengumpulan data, peneliti telah mencoba menganalisis data yang terkumpul untuk memaknainya, yaitu mencari pola tema, kesamaan, dan hipotesis, kemudian menyajikannya dalam bentuk kesimpulan yang masih tentatif adalah Secara bertahap ditarik kesimpulan.

Sementara itu, untuk teknik validasi data dilakukan secara bertahap dimulai dengan refleksi yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian peneliti melakukan member chek serta tanya jawab dengan teman sejawat. Tahap itu selesai dilaksanakan peneliti melakukan kecukupan referensi,

Langkah-langkah Validasi Data



Sumber: Data Diolah

Gambar 3
Langkah-langkah Validasi Data

jejak audit dan triangulasi yang terdiri dari data dan sumber seperti yang tergambar pada Gambar 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Dana Perimbangan

Dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), adalah alat penting untuk mendukung desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan utama yang diberikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal mereka dan merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. DAU memungkinkan pemerintah daerah untuk mendanai berbagai sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan melalui alokasi dana yang adil. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki peran yang berbeda dalam mengatasi kesenjangan fiskal. DAK memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, sementara DBH membagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah (Bappenas, 2020; Shah, 1994).

Dana perimbangan berperan membantu otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan. Dana ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menerapkan berbagai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Masing-masing memiliki tujuan khusus untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak wilayah akan menghadapi kesulitan untuk memaksimalkan potensi mereka, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas, jika tidak ada dana perimbangan. Oleh karena itu, dana perimbangan berfungsi

sebagai alat penting untuk memastikan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia tetap berlangsung. Dalam studi yang dilakukan (Putra dkk., 2024) menjelaskan bahwa dana perimbangan tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan sangat penting untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah. Dana perimbangan diberikan kepada daerah karena merupakan transfer dari pemerintah pusat, tetapi memberikan dorongan bagi mereka untuk lebih mampu mengelola keuangan sendiri. Jika daerah mampu mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan ini, mereka dapat meningkatkan PAD mereka. PAD yang lebih tinggi memungkinkan daerah untuk meningkatkan sektor publik lainnya yang sangat penting. Sebaliknya, daya saing daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dapat ditingkatkan dengan penggunaan dana perimbangan yang efektif seperti yang terlihat pada gambar 4.

Dana perimbangan berfungsi untuk mencapai kesetaraan fiskal dengan mempengaruhi kemampuan daerah untuk mengelola anggaran mereka sendiri. Untuk di Kabupaten Lombok Tengah, dana perimbangan sangat membantu meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Sebaliknya, manajemen yang baik dan transparansi dalam penggunaan anggaran sangat penting untuk pengelolaan dana yang baik. Daerah dengan kapasitas pengelolaan yang baik lebih berhasil dalam memanfaatkan dana perimbangan untuk membangun infrastruktur produktif yang meningkatkan pendapatan mereka (Bahl & Linn, 2018). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan mereka dalam merencanakan, mengalokasikan, dan memantau penggunaan dana ini untuk memaksimalkan dampak pembangunan ekonomi dan sosial (Bahl & Linn, 2018).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu informan dalam kutipan wawancara berikut:

“keterbatasan kami disini adalah dari sisi pengelolaan dan SDM yang berkualitas, selain itu penggunaan dana perimbangan masih menghadapi banyak permasalahan terutama dari sisi tata kelola”

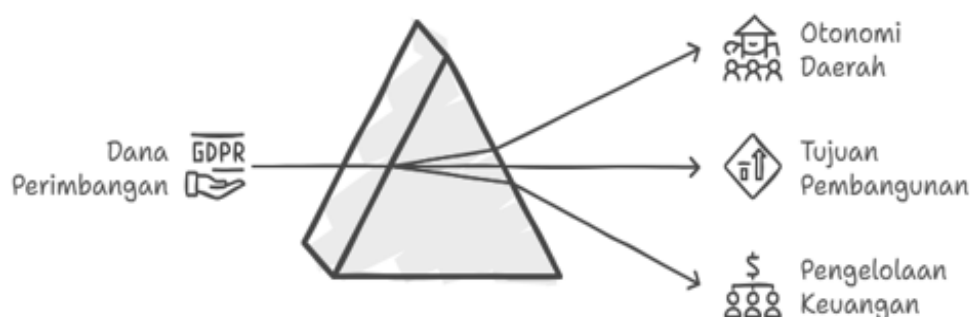
Menurut Oates (1972), teori desentralisasi fiskal mengungkapkan bahwa meskipun transfer dana dari pusat ke daerah berfungsi untuk mencapai kesetaraan, pengelolaan dana perimbangan harus dilakukan secara efisien agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan pada transfer pusat. Hal ini diperkuat dengan temuan dalam laporan World Bank (2021), yang menunjukkan bahwa daerah yang terlalu bergantung pada dana perimbangan tanpa mengoptimalkan potensi lokal mereka akan kesulitan mencapai kemandirian fiskal. Oleh karena itu, selain mengelola dana perimbangan dengan transparansi dan akuntabilitas, daerah harus berfokus pada pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor lokal, seperti pariwisata dan perpajakan, yang dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat (Oates, 1972; World Bank, 2021).

Tantangan Pengelolaan Dana Perimbangan di Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah, sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sangat bergantung pada alokasi dana perimbangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dengan potensi alam yang cukup besar, terutama di sektor pariwisata dan pertanian, dana perimbangan menjadi salah satu sumber utama yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran guna membangun infrastruktur, fasilitas publik, dan layanan dasar lainnya. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Lombok Tengah sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi prioritas bagi pemerataan akses.

Dari gambar 5, terlihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan anggaran dana perimbangan pada tahun 2021-2023 yang diikuti oleh realisasinya. Namun yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah meskipun dana perimbangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah, Kabupaten Lombok Tengah menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan fiskal. Daerah ini masih tergolong memiliki

Mengungkap Dampak Dana Perimbangan



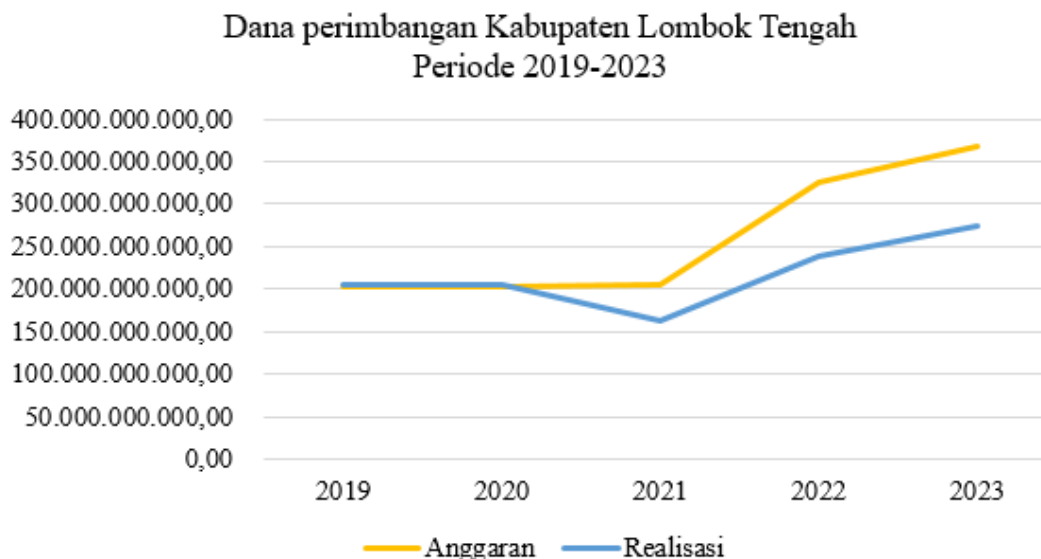
Sumber: Data Diolah 2024

Gambar 4. Dampak Dana Perimbangan

pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas, dengan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dana perimbangan yang diterima sering kali belum mencukupi untuk mengatasi seluruh kebutuhan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang terisolasi dan kurang berkembang. Oleh karena itu, meskipun adanya dana perimbangan, Kabupaten Lombok Tengah perlu fokus pada pengoptimalan sumber pendapatan daerah lainnya, seperti pajak daerah, retribusi, serta potensi pariwisata yang sangat besar. Hal itu dikuatkan dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

“Dana yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah dana sharing dari pusat. Kalau DAK dapat dipergunakan untuk pembangunan Infrastruktur, hal ini sangat berperan untuk menstabilkan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah. Jika diharapkan hanya dari PAD mungkin Pembangunan yang merata tidak akan dapat terwujud”.

Meskipun dana perimbangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah, Kabupaten Lombok Tengah menghadapi tantangan besar terkait ketimpangan fiskal yang masih terjadi. Ketimpangan fiskal ini mencakup perbedaan besar antara kebutuhan pembangunan daerah dengan alokasi dana yang diterima dari pemerintah pusat, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sumber daya yang dimiliki oleh daerah ini, meskipun melimpah terutama di sektor pariwisata dan pertanian, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, yang pada akhirnya membatasi otonomi fiskal daerah. Menurut (Bappenas, 2020), daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap transfer dana dari pusat biasanya mengalami kesulitan dalam merancang kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan.



Sumber: Data LRA Kabupaten Lombok Tengah 2019-2024

Gambar 5. Trend Dana Perimbangan Kabupaten Lombok tengah pada Periode 2019 - 2023

Di samping ketergantungan pada dana transfer, pengelolaan sumber daya yang ada, seperti potensi pariwisata di Lombok Tengah, juga tidak optimal. Potensi sektor pariwisata yang besar, termasuk objek-objek wisata terkenal seperti Pantai Kuta dan Mandalika, belum dikelola secara maksimal untuk meningkatkan PAD. Hal ini terjadi karena infrastruktur yang kurang memadai, terbatasnya promosi, serta rendahnya kapasitas pengelolaan pariwisata yang efektif. Sebagai contoh, meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, alokasi yang diterima masih belum cukup untuk menjangkau seluruh kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung sektor ini. Sementara itu, penelitian oleh (Putra dkk., 2024) menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang kurang efektif sering kali disebabkan oleh keterbatasan kapasitas administrasi dan kelembagaan di tingkat daerah, yang mempengaruhi pengalokasian dan pemanfaatan dana secara optimal.

Tantangan lain dalam pengelolaan dana perimbangan di Lombok Tengah adalah rendahnya kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan dana yang diterima. Sebagai contoh, meskipun alokasi dana perimbangan meningkat dari tahun 2021-2023, pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Salah satu kendala utama adalah adanya masalah dalam koordinasi antara unit-unit kerja di pemerintahan daerah yang menyebabkan alokasi dana menjadi tidak merata. Hal ini mengakibatkan beberapa sektor mengalami kekurangan dana sementara sektor lainnya memiliki surplus anggaran yang tidak terpakai. Seperti yang dijelaskan oleh (Shah, 1994), pengelolaan yang buruk sering kali muncul akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana perimbangan, yang

pada gilirannya mengurangi efektivitas alokasi dana dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, peran Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat penting untuk membantu Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan proyek pembangunan yang sangat diperlukan, seperti pembangunan infrastruktur pariwisata. Kabupaten ini memiliki banyak tempat wisata yang bagus, seperti Pantai Kuta dan Mandalika, yang menarik banyak orang di dalam dan di luar negeri. Infrastruktur yang mendukung wisata, seperti jalan akses, fasilitas umum, dan peningkatan layanan publik, dapat dibangun dengan dana DAK. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik tempat wisata dengan dukungan DAK, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi daerah dan meningkatkan PAD. Dana perimbangan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana tersebut mampu meningkatkan alokasi belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur (Dewi dkk., 2023), (Putri dkk., 2024), (Yanti & Nurtati, 2020).

Peningkatan Kinerja Keuangan melalui Dana Perimbangan

Dana perimbangan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan belanja modal daerah, yang pada gilirannya mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang krusial untuk kesejahteraan masyarakat. Belanja modal ini mencakup alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya yang mendukung perekonomian daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dkk., 2023), dana perimbangan terbukti memiliki dampak positif terhadap alokasi belanja modal yang

digunakan untuk pembangunan fisik yang produktif. Di Kabupaten Lombok Tengah, peningkatan alokasi dana perimbangan dari tahun 2021 hingga 2023 digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dasar, yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan daerah yang tertinggal. Selain itu, pengelolaan dana yang lebih baik dapat menghasilkan multiplier effect yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka peluang bagi sektor lain, seperti pariwisata dan perdagangan (Dewi dkk., 2023).

Kabupaten Lombok Tengah memperbaiki akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien akan memastikan bahwa alokasi dana perimbangan dapat tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mematuhi standar transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai rencana. Selain itu, pengawasan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil studi Dengan hasil sebesar 0,031, yang menunjukkan adanya peningkatan alokasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil, dana perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (Dilliana dkk., 2019).

Dana perimbangan memiliki tujuan strategis dalam mendorong kemajuan di Kabupaten Lombok Tengah. Pengelolaan dana perimbangan yang tepat dapat mempercepat pemerataan pertumbuhan dan kesejahteraan di seluruh masyarakat, meskipun ada beberapa hambatan, seperti PAD yang terbatas dan ketergantungan pada dana transfer. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki kemampuan

untuk mengoptimalkan PAD melalui inovasi dan kerja sama. Ini dapat dicapai dengan melakukan inovasi di bidang perpajakan dan retribusi daerah, baik dalam hal pencatatan maupun pemungutan pajak (Fathurrahman dkk., 2024).

Dana perimbangan juga memainkan peran strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Penggunaan dana ini untuk belanja modal memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Di Kabupaten Lombok Tengah, dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek penting seperti pembangunan jalan akses menuju destinasi pariwisata, yang meningkatkan daya tarik pariwisata daerah dan membuka peluang investasi lebih lanjut. Seiring dengan itu, peningkatan kualitas infrastruktur dasar juga berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pelayanan publik. Seperti yang disarankan oleh Putri dkk. (2024), alokasi dana yang optimal untuk infrastruktur dapat mengurangi disparitas pembangunan dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah untuk tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan mereka bahwa daerah dengan alokasi dana yang tepat untuk pembangunan infrastruktur dapat menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat (Putri dkk., 2024).

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk mengoptimalkan berbagai potensi lokal, adanya mekanisme pembiayaan bersama dengan pemerintah pusat dapat memengaruhi insentif pemerintah daerah untuk menawarkan kontrak yang efisien untuk proyek infrastruktur (Quintana, 2020). Pada dasarnya, penurunan tingkat

efektivitas anggaran belanja disebabkan oleh realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, meskipun ada program yang dilaksanakan tetapi tidak mencapai target (Fathurrahman dkk., 2023).

Meskipun ada peningkatan alokasi dana perimbangan dari tahun 2021 hingga 2023, tantangan dalam pengelolaan dan distribusi dana tersebut masih tetap ada. Penggunaan dana perimbangan yang efektif sangat tergantung pada kapasitas manajerial pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek pembangunan. Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal alokasi dana, tetapi ketimpangan fiskal yang ada dan rendahnya PAD masih menjadi hambatan utama untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek tersebut. Dalam hal ini Shah (1994) menyatakan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan dana perimbangan sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa dana perimbangan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam merencanakan, mengalokasikan, dan memonitor penggunaan dana dengan cermat agar proyek-proyek pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (Shah, 1994).

Sebagai sumber pendapatan utama pemerintah daerah, dana perimbangan sangat penting untuk memperkuat struktur keuangan pemerintah daerah, terutama di daerah dengan pajak yang lebih rendah seperti Kabupaten Lombok Tengah. (Mardiasmo, 2021) menyatakan bahwa daerah yang berhasil mengoptimalkan alokasi DAU dan DAK untuk infrastruktur produktif pada akhirnya mengalami peningkatan PAD hingga 17%. Ini sejalan dengan temuan (Sidik, 2019) bahwa investasi ke dana perimbangan yang

tepat sasaran memiliki efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal. Efek pengganda ini mencakup peningkatan akses pasar dan peningkatan mobilitas ekonomi. Misalnya, DAK yang dialokasikan untuk infrastruktur pasar tradisional Kabupaten Bandung meningkatkan pendapatan retribusi sebesar 23% selama dua tahun implementasi (Kementerian Keuangan, 2022).

Penggunaan dana perimbangan untuk mengurangi disparitas fiskal di Indonesia sangat penting untuk mempromosikan kesetaraan fiskal di antara daerah. Brodjonegoro (2020) menyatakan bahwa formula transfer yang menggabungkan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah terbukti berhasil mengurangi ketidaksamaan dalam layanan publik. Terkait dengan ini, (Kementerian Keuangan, 2023) membuat sistem untuk memantau kesenjangan fiskal. Ini menunjukkan bahwa koefisien Gini fiskal di daerah dengan tata kelola dana perimbangan transparan turun dari 0,42 menjadi 0,35. Lewis (2021) menemukan dengan menarik bahwa reformasi sistem distribusi dana perimbangan yang berfokus pada hasil mendorong daerah bersaing untuk meningkatkan kualitas belanja, yang menghasilkan perbaikan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, kinerja keuangan daerah dapat meningkat melalui optimalisasi dana perimbangan diantaranya sebagai sumber pendapatan, pengurangan kesenjangan fiskal, pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik yang dapat tergambarkan pada gambar 6.

Pengelolaan dana perimbangan harus dilakukan sebagai katalis untuk kemandirian, bukan sebagai ketergantungan, untuk kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan. Menurut studi empiris yang dilakukan oleh Harun & Kambu (2023) pada 15 kabupaten di Indonesia Timur, metode formula berbasis



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 6. Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah dengan Dana Perimbangan

insentif untuk pembagian dana perimbangan berkorelasi positif dengan peningkatan rasio kemandirian fiskal. Sistem perpajakan daerah mengalami pertumbuhan PAD rata-rata 12% per tahun ketika daerah memberikan dana perimbangan minimal 30% untuk meningkatkan kapasitas aparatur (Haryanto, 2022). Selain itu, Shah dan (Shah & Thompson, 2020) menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana perimbangan; publikasi audit kinerja berkala dan laporan pemanfaatan dana telah terbukti meningkatkan penggunaan anggaran hingga 27%.

Dana perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan tujuan mengurangi disparitas fiskal di antara daerah. Dalam hal ini, dana perimbangan tidak hanya berfungsi sebagai distribusi keuangan, tetapi juga mendorong pembangunan dan peningkatan layanan publik di daerah. Selain itu beberapa kendala dalam penyerapan anggaran di Kabupaten Lombok Tengah di antaranya:

(1) rendahnya kemampuan teknis dan manajerial aparatur pemerintah daerah dalam mengelola anggaran; (2) terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan proyek pembangunan; (3) adanya masalah birokrasi yang kompleks dan lambat dalam proses pengadaan barang dan jasa; (4) kurangnya koordinasi dan komunikasi antara unit-unit kerja di dalam pemerintah daerah yang menghambat efektivitas penyerapan anggaran; (5) kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah (Fathurrahman, 2023).

SIMPULAN

Dana perimbangan sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah, terutama bagi Kabupaten Lombok Tengah, yang memiliki keterbatasan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh daerah ini sangat membantu membiayai bidang penting seperti pendidikan, kesehatan,

dan infrastruktur dasar. Jika tidak ada dana perimbangan, Kabupaten Lombok Tengah akan menghadapi tantangan untuk menerapkan berbagai inisiatif pembangunan. Ini terutama berlaku untuk potensi lokal yang belum dikelola secara efektif. Meskipun dana perimbangan sangat membantu, Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi masalah besar karena ketimpangan fiskal dan sumber pendapatan yang terbatas. Untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat, pemanfaatan potensi pariwisata yang melimpah harus menjadi fokus utama. Ini adalah situasi di mana Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur pariwisata yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi daerah. Sangat penting untuk mengelola dana perimbangan secara jelas dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tepat dan bermanfaat langsung bagi masyarakat melalui pengawasan yang baik dan evaluasi berkala. Dengan demikian, dana perimbangan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah. Studi ini merekomendasikan Untuk mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu memperkuat pengelolaan dan pemantauan alokasi anggaran dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan anggaran dan pelaporan penggunaan dana secara berkala. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengevaluasi program pembangunan, guna memastikan bahwa

dana perimbangan digunakan untuk proyek-proyek yang paling relevan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, Kabupaten Lombok Tengah perlu meningkatkan upaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi lokal, terutama sektor pariwisata, untuk memperbesar PAD. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan inovasi dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, serta memperbaiki infrastruktur yang dapat menarik lebih banyak wisatawan. Dengan peningkatan PAD yang signifikan, Lombok Tengah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, sehingga lebih mandiri dalam membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang telah meluangkan waktunya dalam proses pengambilan data. Terima kasih kepada Universitas Islam Al Azhar yang telah menginisiasi kolaborasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, R., & Linn, J. F. (2018). Fiscal Decentralization and the Challenge of Equalization Transfers in Developing Countries. *World Development*, 101, 175–189.
- Bappenas. (2020). *Evaluasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- BPKP. (2022). *Pedoman Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- Brodjonegoro, B. (2020). *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. LPEM FEB UI.
- Dewi, N., Dewi, T., & Asana, G. (2023). Belanja Modal Ditinjau dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020. *Journal Research of Accounting*, 5(1), 59-78. <https://doi.org/10.51713/jarac.v5i1.104>.
- Dilliana, S. M., Gayatri, G., Ratnadi, N. M. D., & Wirajaya, I. G. A. (2019). Regional Financial Performance Mediates The Effect of Regional Balance Funds and Expenditures on Economic Growth. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 164–171. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.782>.
- Fathurrahman. (2023). Strategi Penyerapan Anggaran yang Partisipatif dan Kolaboratif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(2), 261–272. <https://doi.org/10.35967/NJIP.V22I2.629>.
- Fathurrahman, Baiq Dewi Lita Andiana, Triana Lidona Aprilani, Farah Zihatul F, & Ahmad Ridho Hidayat. (2023). Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan. *Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 1–17.
- Fathurrahman, J., S., M., M., & Nasir. (2024). Strategy for Optimizing Regional Original Income (PAD) Through Innovation and Collaboration in Central Lombok Regency. *Jurnal Bina Praja*, 16(2), 347–359. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.347-359>.
- Harun, R., & Kambu, A. (2023). Formula Insentif Dana Perimbangan dan Dampaknya terhadap Kemandirian Fiskal”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 145–162.
- Haryanto, J. T. (2022). *Pengelolaan Dana Perimbangan untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah*. Kemenkeu RI.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kementerian Keuangan. (2022). *Buku Pintar Dana Perimbangan*. Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan. (2023). *Indeks Kemandirian Fiskal Daerah*. Kementerian Keuangan
- Lewis, B. D. (2021). Performance-Based Transfers and Local Government Fiscal Performance in Indonesia”. *Public Administration and Development*, 41(3), 108–124.
- Mahendra, R. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Perimbangan dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 36(1), 77–92.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edisi 3* (3rd ed.). Sage.
- Melkers, J., & Willoughby, K. (2005). *Performance-Based Budgeting*. Public Administration Review.

- Mussa, B., & Wanjiru, A. (2019). The Role of Fiscal Equalization Transfers in Enhancing Regional Development in Developing Countries. *International Journal of Public Sector Management*, 32(4), 314–330.
- Oates, W. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace.
- OJK. (2021). *Analisis Peran Dana Perimbangan dalam Pembangunan Daerah di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Daerah Tahun*. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- Primadi, F., Putra, W., & Gowon, M. (2024). The Impact of Regional Original Income, Balancing Funds, and Fiscal Stress on Capital Expenditures and Regional Government Financial Performance. *Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS)*, 3(6), 937-951. <https://doi.org/10.57185/jetbis.v3i6.117>.
- Putra, I., Rahayu, S., & Friyani, R. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Lentera Bisnis*. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(1), 516-531. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.1049>.
- Putri, N., Indriani, R., & Rahmadini, D. (2024). Effectiveness of Local Revenue and Balance Funds on Capital Expenditure in Indonesian Local Government. *Jurnal Program Studi Akuntansi*, 10(1), 1-8. <https://doi.org/10.31289/jab.v10i1.10791>.
- Saldana, M., & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Shah, A. (1994). *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations*. World Bank.
- Shah, A., Thompson, T. (2020). Implementing Decentralized Local Governance. *World Development Journal*, 38(7), 881–897.
- Sidik, M. (2019). Dana Perimbangan dan Perekonomian Daerah. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 15(1), 35-52.
- World Bank. (2021). *Indonesia Fiscal Decentralization Review*. World Bank.
- Yanti, N., & Nurtati, N. (2020). Economic Growth: Impact of Locally-Generated Revenue and Balance Funds Moderated by Capital Expenditure. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 5(1), 40-54. <https://doi.org/10.30559/jpn.v5i1.173>.